


## Melawan Lupa: Kapitalisme Agraria dan Perlawanan Rakyat Lambu-Sape (Refleksi Gerakan Anti-Tambang di Sumbawa)

Imran Siswadi<sup>1\*</sup>, Imam Yuliadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Jl. Raya Olat Maras Batu Alang, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Bar.

E-mail: [imran.siswadi@uts.ac.id](mailto:imran.siswadi@uts.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1909>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 27 May 2025

Revised: 10 July 2025

Accepted: 19 July 2025

#### Kata Kunci:

Agraria, Tambang,  
Perlawanan, Ingatan,  
Kekuasaan

#### Keywords:

*Agrarian, Mining,  
Resistance, Memory, Power*

### ABSTRACT

Artikel ini mengulas tragedi tambang Lambu-Sape (2010–2012) sebagai studi komparatif untuk memahami dinamika kapitalisme agraria dan perlawanan rakyat terhadap ekspansi tambang di Sumbawa, NTB. Tragedi ini ditandai pembunuhan warga saat demonstrasi menolak proyek PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembakaran kantor pemerintah. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif reflektif, artikel menganalisis hubungan kekuasaan lokal, korporasi, dan negara dalam melegitimasi eksploitasi sumber daya yang mengabaikan hak masyarakat. Data berasal dari catatan lapangan, narasi reflektif penulis, laporan organisasi sipil, dan dokumentasi media. Analisis menggunakan pendekatan historis-kritis dan teori dari Harvey (akumulasi lewat perampasan), Connerton (memori sosial), dan Mbembe (biopolitik). Hasil menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Lambu-Sape adalah resistensi terhadap kapitalisme ekstraktif dan konflik politik. Meski izin tambang dicabut, trauma sosial tetap ada. Memori tragedi ini terancam hilang, sehingga perlu dihidupkan melalui pendidikan kritis, dokumentasi gerakan, dan regenerasi aktivis. Artikel menyimpulkan bahwa melawan lupa adalah strategi politik rakyat untuk mempertahankan ruang hidupnya.

*This article examines the Lambu-Sape mining tragedy (2010–2012) as a comparative case study to explore the dynamics of agrarian capitalism and grassroots resistance to mining expansion in Sumbawa, West Nusa Tenggara. The tragedy involved the killing of civilians during protests against the exploration project by PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), as well as the burning of a local government office. Using a qualitative, reflective case study approach, the article critically analyzes the relationship between local power, corporations, and the state in legitimizing natural resource exploitation that disregards community rights. Data were drawn from field notes, the author's narrative reflections, civil society reports, and media documentation. The analysis employs historical-critical methods and theories from David Harvey (accumulation by dispossession), Paul Connerton (social memory), and Achille Mbembe (biopolitics). Findings reveal that the Lambu-Sape resistance reflects opposition to extractive capitalism and political conflict management. Although the mining permit was revoked, social trauma persists. The memory of the tragedy is at risk of being forgotten, underscoring the need for critical education, movement documentation, and activist regeneration. The article concludes that resisting forgetfulness is not only a moral act, but a political strategy for communities to defend their living spaces.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Imran Siswadi, et al (2025). Melawan Lupa: Kapitalisme Agraria dan Perlawanan Rakyat Lambu-Sape (Refleksi Gerakan Anti-Tambang di Sumbawa), 4 (1) 1788-1795. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1909>

### PENDAHULUAN

Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan deregulasi besar-besaran dalam sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan. Pemerintah

membuka ruang selebar-lebarnya bagi investor swasta dan asing untuk mengakses izin eksplorasi dan eksploitasi tambang di berbagai daerah. Fenomena ini memicu “ledakan izin tambang” yang terjadi hampir di seluruh wilayah, termasuk di kawasan Indonesia Timur yang kaya akan cadangan mineral strategis (WALHI, 2013). Kebijakan seperti UU Minerba No. 4 Tahun 2009 serta desentralisasi kewenangan pengelolaan tambang ke tingkat daerah turut mempercepat ekspansi investasi ekstraktif ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi dan politik (Bachriadi & Lucas, 2001).

Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Sumbawa, merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran utama dari gelombang eksploitasi ini. Selain karena kandungan emas, tembaga, pasir kuarsa, dan batuan lainnya yang melimpah, Sumbawa juga dianggap strategis secara geografis dan relatif “kosong” dari resistensi pada awalnya. Namun anggapan itu terbukti keliru. Beberapa wilayah seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat mulai menunjukkan gelombang perlawanan rakyat yang semakin terorganisasi. Salah satu titik puncak dari dinamika tersebut terjadi pada akhir 2011 hingga awal 2012, ketika warga Kecamatan Lambu dan Sape di Kabupaten Bima melakukan aksi besar-besaran menolak tambang PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

Aksi yang berujung pada tragedi berdarah di Pelabuhan Sape menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan agraria di Indonesia Timur. Setidaknya lima orang tewas (versi aktivis), puluhan luka-luka, dan ribuan lainnya mengalami trauma sosial akibat tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran (WALHI NTB, 2012; YLBHI, 2013). Meski akhirnya izin eksplorasi tambang dicabut oleh pemerintah daerah, luka politik dan sosial akibat peristiwa tersebut masih menyisakan jejak panjang yang belum banyak diulas dalam kajian akademik.

Peristiwa di Lambu–Sape bukan hanya tentang konflik antara rakyat dan tambang, melainkan merupakan ekspresi dari pertarungan struktur kuasa, ekonomi politik sumber daya, dan krisis keadilan ekologis. Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya untuk “melawan lupa” terhadap tragedi tersebut. Perlawanan rakyat Sape tidak hanya penting sebagai memori kolektif, tetapi juga sebagai refleksi strategis bagi gerakan anti-tambang lainnya di Pulau Sumbawa yang kini menghadapi ancaman serupa di Dompu, Hu’u, 1, dan Sumbawa Barat. Menjadikan kasus Lambu–Sape sebagai studi utama, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami kapitalisme agraria sebagai proses struktural, serta pentingnya pengorganisasian rakyat dan ingatan kolektif dalam menghadapi gelombang eksploitasi tambang yang terus berulang. Karena seperti yang diingatkan oleh Connerton (1989), bangsa yang kehilangan ingatan adalah bangsa yang akan mengulang tragedi yang sama, dalam bentuk yang lebih brutal.

## METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan desain eksploratif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami dinamika perlawanan rakyat terhadap ekspansi tambang dalam konteks kapitalisme agraria di Pulau Sumbawa, dengan fokus utama pada kasus tragedi Lambu–Sape (2010–2012). Pendekatan ini dipilih karena karakteristik kajiannya yang tidak sekadar menjelaskan fakta empiris, tetapi juga menafsirkan makna sosial, politik, dan historis dari sebuah peristiwa berdasarkan pengalaman masyarakat dan penulis sebagai pengamat lokal (*emic-insider perspective*).

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *autoetnografi kritis*, yakni metode kualitatif yang menggabungkan narasi personal peneliti sebagai bagian dari masyarakat dengan analisis ilmiah terhadap struktur sosial yang lebih luas (Ellis et al., 2011). Dalam konteks ini, penulis tidak memposisikan diri secara objektif-eksternal, melainkan sebagai bagian dari medan sosial yang dikaji—mengalami, mengamati, dan merefleksikan peristiwa secara langsung. Posisi ini memungkinkan kedalaman analisis yang tidak hanya berdasarkan data formal, tetapi juga pengalaman hidup dan pengetahuan lokal yang terinternalisasi (Spry, 2001). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, berupa catatan lapangan, narasi personal, dan dokumentasi reflektif yang ditulis oleh penulis pada tahun 2013 yang merekam kronologi dalam tulisan dan analisis konflik Lambu–Sape.
2. Data sekunder, diperoleh dari laporan advokasi WALHI dan YLBHI, arsip berita daring dari media nasional, dokumen pemerintah daerah, serta literatur ilmiah terkait teori kapitalisme agraria, memori kolektif, dan kekerasan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, penelusuran arsip media daring, dan peninjauan ulang terhadap refleksi lapangan yang ditulis dalam periode dekat dengan kejadian. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan historis-kritis dan analisis wacana. Metode ini

memungkinkan pembacaan ulang terhadap konstruksi narasi kekuasaan dan resistensi masyarakat melalui lensa teori sosial kritis (Fairclough, 2010).

Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori-teori seperti “*accumulation by dispossession*” dari Harvey (2004) untuk melihat kerangka kapitalisme ekstraktif; teori memori sosial dari Connerton (1989) untuk memahami dinamika ingatan kolektif; serta biopolitik dari Mbembe (2003) untuk mengkaji kekerasan negara terhadap tubuh rakyat sebagai instrumen kontrol. Peneliti juga merujuk pada teori gerakan sosial dan pendidikan pembebasan dari Freire (1970) untuk membaca pentingnya pendidikan kritis dan regenerasi dalam perlawanan jangka panjang.

Pendekatan ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta historis, tetapi juga menyusun kembali makna sosial-politik dari peristiwa yang kerap dilupakan. Penelitian ini menempatkan pengalaman lokal sebagai bagian integral dari proses pengetahuan dan perlawanan terhadap struktur dominasi yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Kapitalisme Agraria dan Ekspansi Tambang***

Kapitalisme agraria bukan sekadar soal penguasaan tanah, tetapi merupakan bagian dari proses ekonomi-politik global di mana ruang hidup masyarakat lokal diubah menjadi objek akumulasi modal. David Harvey (2004) menyebut proses ini sebagai “*accumulation by dispossession*” — akumulasi yang dibangun di atas perampasan: perampasan tanah, air, sumber daya, bahkan hak hidup komunitas lokal. Dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia, model kapitalisme ini tampil dalam wajah kapitalisme ekstraktif yang menjadikan pertambangan sebagai jalan pintas pembangunan ekonomi nasional, meski dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Teori agrarian question (Kautsky, Lenin, Bernstein) dalam diskursus sosiologi pedesaan pun turut relevan di sini. Ketika negara menjadikan lahan-lahan pertanian, hutan adat, dan kampung nelayan sebagai objek eksploitasi industri tambang, yang terjadi bukan transformasi ekonomi rakyat, melainkan disintegrasi sosial. Alih-alih memberdayakan petani atau masyarakat adat, kapitalisme ekstraktif justru mempercepat proses proletarianisasi, pemiskinan struktural, dan penghancuran ikatan agraris lokal (Li, 2014; Borrás et al., 2011).

Di Indonesia, ekspansi tambang ditopang oleh kebijakan yang permisif terhadap investor. Pasca reformasi, deregulasi dan desentralisasi membuat izin tambang dikeluarkan secara masif oleh kepala daerah. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi instrumen hukum utama yang membuka jalan bagi korporasi tambang skala besar maupun kecil untuk mengeksplorasi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Dalam praktiknya, banyak izin diberikan tanpa mekanisme partisipasi, konsultasi publik, atau pertimbangan ekologis—menjadikan konflik agraria sebagai gejala struktural (WALHI, 2013; KPA, 2020).

Pulau Sumbawa merupakan contoh konkret dari wilayah yang terjerat dalam proyek besar kapitalisme ekstraktif. Wilayah ini kaya akan cadangan emas, tembaga, pasir kuarsa, dan batuan industri. Di Kabupaten Sumbawa Barat, tambang emas Batu Hijau (eks-Newmont, kini Amman Mineral) menjadi ikon eksploitasi mineral berskala global. Sementara di Dompu, eksplorasi dan ekspansi tambang emas oleh berbagai perusahaan telah memicu ketegangan sosial dan ancaman ekologis, terutama di wilayah Hu'u.

Di Kabupaten Bima sendiri, potensi tambang mencakup logam mulia dan pasir kuarsa yang tersebar di kawasan pegunungan dan pesisir. Eksplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu dan Sape pada tahun 2010–2012 menjadi titik ledak dari ketegangan tersebut. SK Bupati No. 188 yang memberi izin eksplorasi kepada PT SMN menunjukkan bahwa kekuasaan lokal telah menjadi pintu masuk legal bagi kepentingan korporasi. Namun resistensi rakyat Lambu–Sape yang akhirnya memaksa pencabutan izin tambang membuktikan bahwa tanah tidak pernah sekadar “komoditas” — melainkan identitas, sejarah, dan ruang hidup. Ekspansi tambang di Sumbawa bukan hanya soal investasi atau pembangunan, melainkan konflik antara dua cara hidup: satu yang berakar pada tanah dan komunitas, dan satu lagi yang berorientasi pada ekstraksi dan pasar global. Dan konflik ini akan terus berulang selama negara terus memosisikan sumber daya alam sebagai komoditas, bukan sebagai hak hidup rakyat.

### ***Studi Komparatif: Tragedi Tambang Lambu–Sape (2010–2012)***

#### **Kronologi Peristiwa**

Konflik tambang di Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap proyek ekstraksi sumber daya alam yang dianggap mengancam ruang hidup mereka. Pada tahun 2010, Bupati Bima menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 188 yang memberikan izin eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) atas lahan seluas lebih dari 24.000 hektare di wilayah pesisir Lambu–Sape. Izin tersebut diberikan tanpa sosialisasi yang memadai, dan menimbulkan keresahan masyarakat yang merasa bahwa hak atas ruang hidup mereka diabaikan demi kepentingan korporasi (WALHI NTB, 2012).

Gelombang penolakan menguat sejak 2010 dan mencapai puncaknya pada Desember 2011. Ribuan warga menduduki Pelabuhan Sape sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah. Aksi tersebut berakhir tragis pada 24 Desember 2011, ketika aparat keamanan melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi. Menurut versi kepolisian, insiden ini menewaskan 3 orang warga, sementara laporan WALHI menyebutkan sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka (YLBHI, 2013; WALHI NTB, 2012).

Pada 26 Januari 2012, protes lanjutan berlangsung secara lebih masif. Massa yang merasa diabaikan melancarkan aksi ke kantor Bupati Bima dan KPUD. Dalam situasi yang tidak terkendali, terjadi pembakaran terhadap kedua gedung tersebut. Dalam tekanan politik dan opini publik yang meluas, pemerintah daerah akhirnya mencabut izin eksplorasi PT SMN, sehingga secara normatif tuntutan utama masyarakat terpenuhi.

#### **Kekerasan Negara dan Trauma Kolektif**

Tindakan represif aparat terhadap warga sipil menunjukkan bahwa konflik ini juga merupakan bentuk kekerasan negara terhadap warga negara. Dalam perspektif biopolitik, kematian demonstran dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya negara dalam mengatur, mengontrol, dan jika perlu, mengorbankan tubuh rakyat demi kelangsungan tatanan ekonomi-politik dominan (Mbembe, 2003). Tubuh-tubuh yang menjadi korban dalam konflik ini merepresentasikan “tumbal sosial” dari proyek pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya.

Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada keluarga korban, tidak ada proses rehabilitasi psikologis, dan negara tidak pernah secara terbuka mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden tersebut. Ketika luka tidak dipulihkan dan ingatan dipinggirkan, maka trauma menjadi bagian dari struktur sosial yang terus hidup di benak masyarakat (Connerton, 1989).

#### **Pembatalan Izin dan Luka yang Belum Pulih**

Secara normatif, pencabutan izin eksplorasi PT SMN dapat dipandang sebagai keberhasilan gerakan sosial rakyat Lambu–Sape. Namun keberhasilan ini tidak diikuti dengan rekonstruksi kelembagaan rakyat, tidak adanya jaminan bahwa wilayah tersebut tidak akan kembali dieksploitasi di masa depan, dan tidak munculnya konsolidasi gerakan secara berkelanjutan di tingkat regional.

Ketidakhadiran negara dalam proses pemulihan pasca-konflik, serta tendensi melupakan tragedi secara institusional, menjadi pertanda bahwa kemenangan tersebut bersifat parsial dan rapuh. Tragedi Lambu–Sape menjadi penanda bahwa proyek tambang bukan hanya soal tanah dan kekayaan alam, tetapi juga tentang siapa yang berhak hidup, mengelola, dan mengingat sejarahnya.

#### ***Refleksi Perlawanan: Dari Lambu ke Wilayah Tambang Lain di Sumbawa***

Perlawanan rakyat terhadap ekspansi tambang di Pulau Sumbawa tidak berhenti di Lambu–Sape. Konflik agraria dan pertambangan terus berulang dalam bentuk dan lokasi yang berbeda. Dalam konteks ini, perlawanan di Lambu tidak hanya penting sebagai peristiwa historis, tetapi juga sebagai tolok ukur, inspirasi, sekaligus peringatan terhadap wilayah lain yang mengalami tekanan serupa dari proyek ekstraksi sumber daya.

#### **Tambang Batu Hijau: Sumbawa Barat dan Politik Ekstraksi Global**

Wilayah Sumbawa Barat merupakan lokasi tambang emas dan tembaga berskala internasional, yang dikelola sebelumnya oleh PT Newmont Nusa Tenggara dan kini dilanjutkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Tambang Batu Hijau menjadi simbol kapitalisme ekstraktif global di Indonesia Timur. Meskipun proyek ini sering dipromosikan sebagai "tambang modern yang ramah lingkungan",

berbagai laporan mencatat kerusakan ekologis dan marjinalisasi masyarakat adat Tongo dan sekitarnya (JATAM, 2019). Wilayah ini menunjukkan minimnya ruang perlawanan terbuka, karena dominasi kekuatan korporasi yang bersinergi dengan elit lokal serta ketergantungan ekonomi masyarakat pada tambang.

### **Dompu dan Eksploitasi Emas Skala Kecil**

Kabupaten Dompu juga menjadi target eksploitasi emas, terutama di wilayah Hu'u. Berbeda dengan Batu Hijau, tambang di Dompu umumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan dengan skala menengah atau kecil, namun tetap memicu konflik horizontal antara kelompok masyarakat, serta antara warga dan aparat negara. Dalam banyak kasus, warga yang menolak tambang menghadapi kriminalisasi, sementara perizinan tambang dikeluarkan tanpa konsultasi publik yang memadai (WALHI NTB, 2021).

### **Polemik Pasir Kuarsa dan Galian C di Wilayah Pesisir**

Seiring meningkatnya permintaan bahan baku industri, wilayah pesisir seperti Langgudu dan sebagian Hu'u menjadi incaran eksploitasi pasir kuarsa. Proyek-proyek ini acap kali dikaitkan dengan investor domestik dan asing yang memburu bahan mentah untuk energi surya dan industri semikonduktor global. Di sisi lain, masyarakat lokal hanya menjadi penonton, dengan degradasi lingkungan dan gangguan terhadap aktivitas pertanian dan perikanan sebagai konsekuensinya (Tempo.co, 2023). Tambang-tambang galian C lain juga mulai masuk ke desa-desa di Bima bagian selatan, tanpa transparansi dan pengawasan.

### **Apakah Perlawanan Terus Berlanjut?**

Pertanyaan penting yang muncul adalah: apakah semangat perlawanan seperti di Lambu–Sape masih berlanjut? Jawabannya ambivalen. Di satu sisi, solidaritas akar rumput di tingkat lokal masih ada, namun fragmentasi gerakan dan minimnya jejaring lintas wilayah membuat perlawanan sering bersifat sporadis dan reaktif. Tidak ada organisasi regional yang secara berkelanjutan mengkonsolidasikan pengalaman-pengalaman resistensi di Pulau Sumbawa sebagai satu gerakan kolektif anti-tambang.

Beberapa aktivis lokal yang sebelumnya terlibat dalam aksi Lambu kini bergerak secara individu atau berpindah ke isu lain. Sebagian masyarakat juga mengalami kelelahan struktural — baik karena represi, kooptasi elite, maupun tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, memori kolektif perlawanan Lambu–Sape mulai redup, dan ruang-ruang diskusi kritis cenderung menyempit.

### **Posisi Ingatan Lambu–Sape dalam Gerakan Hari Ini**

Ingatan tentang tragedi Pelabuhan Sape tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap hidup dalam cerita-cerita informal, kisah orang tua kepada anak, atau catatan aktivis yang tersebar di blog dan arsip pribadi. Namun tanpa proses institusionalisasi—baik melalui pendidikan lokal, dokumen sejarah, ataupun media populer—ingatan ini berisiko menjadi fragmen nostalgia yang tak lagi menjadi kekuatan politik.

Menurut Connerton (1989), masyarakat yang tidak memiliki mekanisme untuk mengingat bersama akan mudah dimanipulasi oleh narasi dominan. Oleh karena itu, melawan lupa bukan hanya mengenang luka masa lalu, tetapi membangun kembali struktur sosial dan budaya yang mampu menjadikan memori sebagai dasar tindakan kolektif. Perlawanan di Sape harus ditulis, diajarkan, dan dirawat—bukan sekadar untuk mengenang, tetapi untuk membangun kesadaran baru di wilayah-wilayah yang kini tengah menghadapi ancaman eksploitasi serupa.

### ***Melawan Lupa: Menghidupkan Memori, Mengorganisasi Harapan***

Perlawanan rakyat terhadap tambang tidak hanya terjadi di medan fisik—seperti blokade pelabuhan atau aksi demonstrasi—tetapi juga berlangsung di medan simbolik: memori kolektif. Dalam konteks ini, “melawan lupa” adalah bentuk perjuangan ideologis dan kultural untuk mempertahankan ingatan rakyat atas ketidakadilan yang pernah terjadi. Menurut Connerton (1989), masyarakat yang tidak memiliki mekanisme untuk mengingat secara kolektif akan rentan dimanipulasi oleh narasi dominan yang dilanggengkan oleh kekuasaan.

Tragedi di Pelabuhan Sape pada 2011, di mana aparat keamanan menewaskan warga sipil yang menolak tambang, merupakan bagian dari sejarah luka kolektif masyarakat Bima. Namun luka ini terancam terlupakan. Minimnya dokumentasi resmi, absennya pengakuan negara, dan tiadanya proses keadilan transisional menjadikan peristiwa tersebut hanya hidup dalam cerita lisan atau blog pribadi. Jika tidak dijaga, ingatan rakyat akan terkikis oleh waktu dan pembangunan narasi versi penguasa.

Pendidikan kritis menjadi instrumen penting dalam menjaga memori perlawanan. Freire (1970) menekankan pentingnya kesadaran kritis (conscientization) sebagai cara bagi rakyat untuk memahami

struktur penindasan dan membangun kapasitas kolektif untuk perubahan. Sekolah-sekolah lokal, pesantren, forum komunitas, bahkan ruang-ruang seni rakyat dapat menjadi sarana untuk menanamkan sejarah perlawanan yang berakar pada pengalaman lokal. Selain pendidikan, dokumentasi gerakan juga harus diperkuat. Banyak gerakan sosial di Indonesia gagal membangun kesinambungan perjuangan karena tidak meninggalkan jejak tertulis yang dapat diwariskan ke generasi berikutnya (Aspinall, 2005). Tanpa dokumentasi yang sistematis—baik dalam bentuk buku, video, arsip digital, atau museum rakyat—maka pengalaman-pengalaman penting seperti Lambu–Sape hanya akan dikenang sebagai fragmen nostalgia, bukan sebagai fondasi gerakan baru. Peran pemuda, seniman, akademisi, dan tokoh adat menjadi sangat strategis. Pemuda dan mahasiswa dapat menghidupkan diskusi kritis dan jejaring advokasi lintas daerah. Seniman lokal dapat menghadirkan ingatan melalui karya-karya visual, pertunjukan, atau sastra yang merefleksikan penderitaan dan harapan rakyat. Akademisi memiliki tanggung jawab etis untuk menulis ulang sejarah dari perspektif rakyat dan menentang narasi hegemonik negara. Sementara tokoh adat dapat menjaga relasi spiritual dan kultural antara masyarakat dan tanahnya, sebagai penyangga identitas komunitas agraris yang terus terancam oleh kapitalisme ekstraktif.

Upaya agitasi dan propaganda perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya dalam situasi krisis. Karena sebagaimana pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan, kapitalisme ekstraktif cenderung kembali—seringkali dengan wajah baru dan strategi yang lebih licik—saat rakyat lengah dan ingatan kolektif melemah (Borras & Franco, 2012). Maka dari itu, menjaga ingatan bukan tindakan romantis, melainkan strategi bertahan hidup.

## KESIMPULAN

Tragedi tambang Lambu–Sape pada 2010–2012 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perlawanan rakyat terhadap kapitalisme ekstraktif di wilayah timur Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa proyek pertambangan bukan sekadar proses ekonomi, melainkan juga persoalan politik, kekuasaan, dan keberlanjutan sosial-ekologis. Melalui studi ini, tampak jelas bahwa struktur kekuasaan lokal, legalitas semu, dan represi negara bersatu dalam mendukung kepentingan modal, bahkan dengan mengorbankan nyawa warga sipil. Keberhasilan rakyat dalam memaksa pencabutan izin tambang PT Sumber Mineral Nusantara adalah bentuk kemenangan moral dan politik. Namun kemenangan ini tidak utuh. Luka kolektif belum dipulihkan, keadilan belum ditegakkan, dan memori rakyat perlahan dilupakan. Ingatan tentang Lambu–Sape berisiko menjadi arsip sunyi jika tidak dihidupkan kembali melalui pendidikan, dokumentasi, dan regenerasi gerakan.

Melalui refleksi atas kasus-kasus pertambangan lain di Pulau Sumbawa—seperti Batu Hijau di Sumbawa Barat, blok emas di Dompu, serta eksploitasi pasir kuarsa di wilayah pesisir—artikel ini menekankan bahwa skema kapitalisme agraria masih terus berlangsung dalam wajah yang berubah-ubah. Oleh karena itu, melawan lupa menjadi strategi politik jangka panjang, bukan sekadar sikap simbolik. Ingatan kolektif harus dijadikan landasan untuk membangun kekuatan rakyat yang sadar sejarah dan siap menghadapi ancaman baru. Sebagaimana telah dikemukakan oleh berbagai teori memori sosial dan gerakan rakyat, hanya dengan mengorganisasi harapan dan merawat ingatan bersama, rakyat dapat mempertahankan hak atas tanah, kehidupan, dan masa depan yang adil. Sebagai catatan penutup, penting untuk ditegaskan bahwa:

*Aktivis anti-tambang di Pulau Sumbawa tidak boleh lengah terhadap eksploitasi alam yang terus membayangi. Tambang-tambang di pulau ini bisa saja kembali diutak-atik ketika kita lengah. Melawan lupa bukan hanya tentang mengenang luka masa lalu, tetapi menjaga kewaspadaan hari ini.*

Dengan demikian, tulisan ini bukan hanya ajakan untuk mengenang perlawanan masa lalu, tetapi juga seruan untuk membangun daya tahan sosial-politik dalam menghadapi siklus perampasan yang terus berulang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Bachriadi, D., & Lucas, A. (2001). *Merampas Tanah Rakyat: Kasus-Kasus Perampasan Tanah di Indonesia*. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change: A preliminary analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59.
- Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., White, B., & Wolford, W. (2011). Towards a better understanding of global land grabbing: An editorial introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(2), 209–216.
- Connerton, P. (1989). *How societies remember*. Cambridge University Press.
- Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum: Qualitative Social Research*, 12(1). <https://doi.org/10.17169/fqs-12.1.1589>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Harvey, D. (2004). The ‘new’ imperialism: Accumulation by dispossession. *The Socialist Register*, 40, 63–87.
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2019). *Tambang Batu Hijau dan Sumbawa dalam Cengkeraman Ekstraksi Global*. Jakarta: JATAM.
- KPA. (2020). *Catatan Akhir Tahun: Konflik Agraria dan Agenda Reforma Agraria*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Li, T. M. (2014). *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- WALHI. (2013). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2012–2013: Krisis Ekologis dan Perampasan Ruang Hidup*. Eksekutif Nasional WALHI
- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Spry, T. (2001). Performing autoethnography: An embodied methodological praxis. *Qualitative Inquiry*, 7(6), 706–732.
- Tempo.co. (2023, March 10). *Potensi Pasir Kuarsa di NTB: Surga Baru Industri dan Ancaman Lingkungan*. <https://www.tempo.co/>
- WALHI NTB. (2021). *Laporan Advokasi Lingkungan NTB Tahun 2020–2021*. Mataram: WALHI Nusa Tenggara Barat.
- WALHI NTB. (2012). *Laporan investigasi lapangan konflik tambang di Lambu-Sape*. WALHI Nusa Tenggara Barat.
- WALHI. (2013). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2012–2013: Krisis Ekologis dan Perampasan Ruang Hidup*. Eksekutif Nasional WALHI.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2013). *Catatan akhir tahun HAM dan demokrasi: Negara melukai rakyat*. YLBHI.